

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arba, Haji. (2017). *Hukum Agraria Indoensia*, Cetakan Keempat, Jakarta, Sinar Grafika.

Kuncoro, Wahyu. (2015). *Risiko Transaksi Jual Beli Properti*, Cetakan Pertama, Jakarta, Penebar Swadaya Group.

Mulyadi. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sembiring, Rosnidar. (2017). *Hukum pertanahan adat*. Cetaka pertama, Depok, PT Raja grafindo persada.

Santoso,Urip. (2016). *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Cetakan Keenam, Jakarta, Kencana.

Sarkawi, (2014). *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Safitri, Myrna A, Moelionom, Tristam. (2010). *Hukum Agraria Dan Masyarakat di Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta Huma.

Tehupeueory, Aartje (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Penebar Swadaya Group.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan*. Bandung : Alfa Beta.

Uktolseja, Novyta dkk, (2021). *Buku Ajar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Klaten, Lakeisha.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2015 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat.

C. Website

Adminuniv, Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria, <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria>, diakses tanggal 16 Maret 2023.

Sovia Hasanah, Pendaftaran Tanah Secara Massal, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-tanah-secara-massal-lt5902cfc843d40>, diakses tanggal 16 Maret 2023.

Tagor Julio Parhusip, Adakah Kesamaan Antara Hak Kebendaan dengan Hak Perorangan?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-kesamaan-antara-hak-kebendaan-dengan-hak-perorangan-lt5ab6c63951dac>. Diakses tanggal 16 Maret 2023.

Tim Editorial Rumah.com, Mengenal Tanah Ulayat, Hukum Tanah Adat, dan Dasar Hukumnya, <https://www.rumah.com/panduan-properti/tanah-ulyat-hukum-tanah-adat-53337>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

Sigar Aji Poerana, Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulyat-lt4f1654e73aad1/>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

D. Jurnal

Arina Novizas Shebubakar, Marrie Remfan Raniah, “*Hukum Tanah Adat/Ulayat*”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol.4 No. 1.

Azam, Syaiful. “*Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria*”, Fakultas Hukum USU.

Sari, D. M. (2021). *Implentasi Kegiatan Keagamaan Dalam Peningkatan Dispin Siswa Madrasah Tsnawiyah Laboratorium Kota Jambi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudiin.

Setiadi, Wicipto. “*Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dikaitkan Dengan Model Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Di Tanjungsari, Kabupaten Bogor*”, Jurnal Rechtsvinding, Vol.8 No. 1.

- Sukirno. (2018). *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta, Kencana.
- Taufik, & Isril. (2013). Implentasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4, 136.
- Tanjung, Miethera. (2014). *Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Wahyuni, (2017) “*Konsep Berbagi Peta Untuk Penngkatan Peran Desa Dalam Penyelenggaraan Percepatan Pendaftaran Tanah*”, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

E. Wawancara

Wawancara dengan bapak Sujono sebagai (Koordinator Substansi Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara.

